



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN

UNIT KERJA : MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUSTOMI MASIK**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL**
3. NHK : **946482**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 7.870.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.440 m2/200 m2 di KAB / KOTA BENGKULU SELATAN, Rp. 2.200.000.000
2. Tanah Seluas 15.625 m2 di KAB / KOTA SELUMA, Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 15.625 m2 di KAB / KOTA SELUMA, Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/91 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , Rp. 700.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 293 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
6. Tanah Seluas 38.580 m2 di KAB / KOTA BENGKULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 530 m2/480 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/76 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
9. Tanah Seluas 361 m2 di KAB / KOTA BENGKULU SELATAN, Rp. 400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 69.000.000

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
16.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SPORT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 210.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 8.149.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.149.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.